

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Natuna

1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI). Natuna pada awalnya dikenal sebagai wilayah Pulau Tujuh yang merupakan gabungan dari tujuh kecamatan kepulauan yang terbesar di perairan Laut Cina Selatan yang sekarang telah di ubah menjadi Laut Natuna Utara. yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan dan Tambelan.

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia No.9/Depart tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri kedalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dan membawahi empat kewedanan sebagai berikut:

- Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan(termasuk Kecamtan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan TanjungPinang Timur).
- Kewedanan Karimun meliputi wilayah kecamatan Karimun, Kundur, Moro.

- Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang.
- Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No.26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1965 No. UP/247/5/1965 dan tanggal 15 November 1965 No.UP/256/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Natuna dibentuk hasil dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau dan meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna, wilayah kecamatan kemudian dimekarkan lagi, sehingga pada tahun 2004 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 (Sepuluh) kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut.

Pada tahun 2007 wilayah Natuna kemabali dimekarkan lagi menjadi 16 kecamatan. Kemudian berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Natuna yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7 (Tujuh) Kecamatan di gugusan pulau Anambas.

Sedangkan Natuna terbagi atas 12 (Dua belas) kecamatan yakni dengan dengan penambahan kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, dan Serasan Timur.

2. Geografis

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia. Kabupaten Natuna merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau sebelum menjadi Provinsi yang secara resmi di bentuk dengan dasar Undang-Undang No 53 tahun 1999. Pusat ibu kota Ranai terletak di Pulau Bunguran besar, sebagai ibukota Kabupaten. Posisi Natuna terletak di paling utara Indonesia. Kabupaten Natuna terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baik dari segi pertahanan, segi bisnis maupun keamanan Negara karena Kabupaten Natuna terletak pada jalur pelayaran Internasional. Secara geografis Kabupaten Natuna yang terletak pada posisi $1^{\circ}16' - 7^{\circ}19' LU$ dan $105^{\circ}00' - 110^{\circ}00' BT$. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, Kabupaten Natuna memiliki luas 264.198,37 km² dimana sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km².

3. Administratif

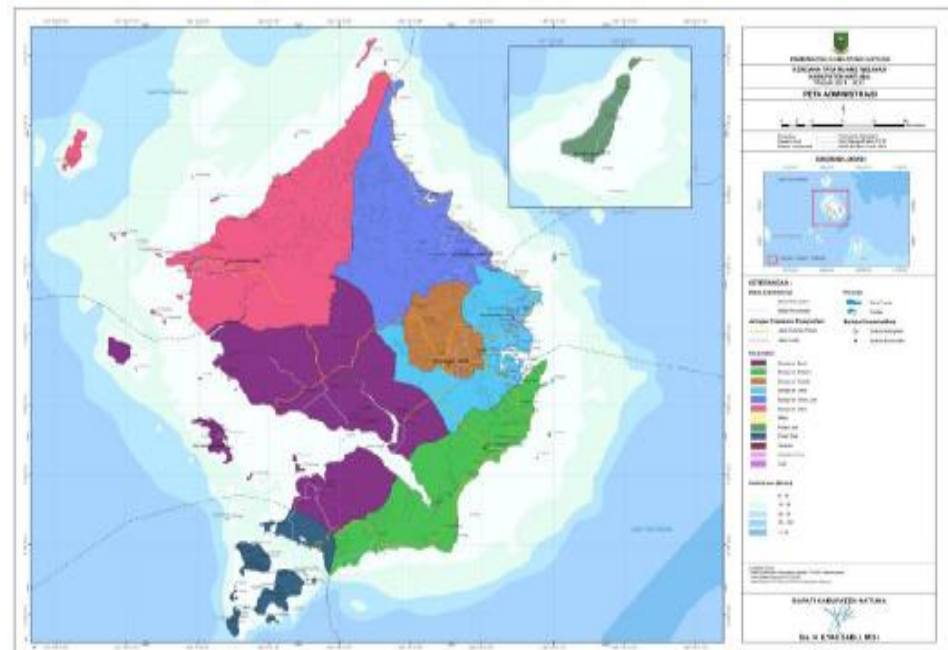
Dikabupaten Natuna terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran, dan Pulau Serasan. Secara administratif Kabupaten Natuna berbatasan dengan Sebelah Utara Negara Vietnam dan Kamboja Sebelah Selatan Kabupaten Bintan Sebelah Barat Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas Sebelah Timur Malaysia Bagian Timur (Sarawak) dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Pulau Laut, Pulau Tiga, Serasan, Serasan Timur, Subi, dan Midai. Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Kamboja
- b. Sebelah Timur : Malaysia Bagian Timur (Sarawak) dan Kalimantan Barat
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan
- d. Sebelah Barat : Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pemekaran wilayah kecamatan sekarang ini terjadi di beberapa wilayah, yaitu kecamatan Bunguran Batubi, Pulau Tiga Barat dan

Suak Midai sehingga Kabupaten Natuna memiliki wilayah administratif kecamatan menjadi 15 kecamatan.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Natuna, 2016



Sumber: Perda Kab. Natuna No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031

Kabupaten Natuna dengan persentase luas daratan yang terbesar yaitu kurang lebih sebesar 27 persen dari total luas daratan di Provinsi Kepulauan Riau dengan 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Pulau Laut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan, 2015

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)		
			Daratan	Lautan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Midai	Sabang Barat	26.10	262.197.07	264.198.37
2	Bunguran Barat	Sedanau	448.46		
3	Bunguran Utara	Kelarik	404.71		
4	Pulau Laut	Air Payang	37.69		
5	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	67.87		
6	Bunguran Timur	Ranai	146.83		
7	Bunguran Timur Laut	Tanjung	235.01		
8	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	172.71		
9	Bunguran Selatan	Cemaga	233.99		
10	Serasan	Serasan	43.65		
11	Serasan Timur	Terayak	160.93		
12	Subi	Arung Ayam	23.35		
Kabupaten Natuna		Ranai	2.001.30	262.197.07	264.198.37

Sumber: Bakorsortanal dan BPS Kabupaten Natuna

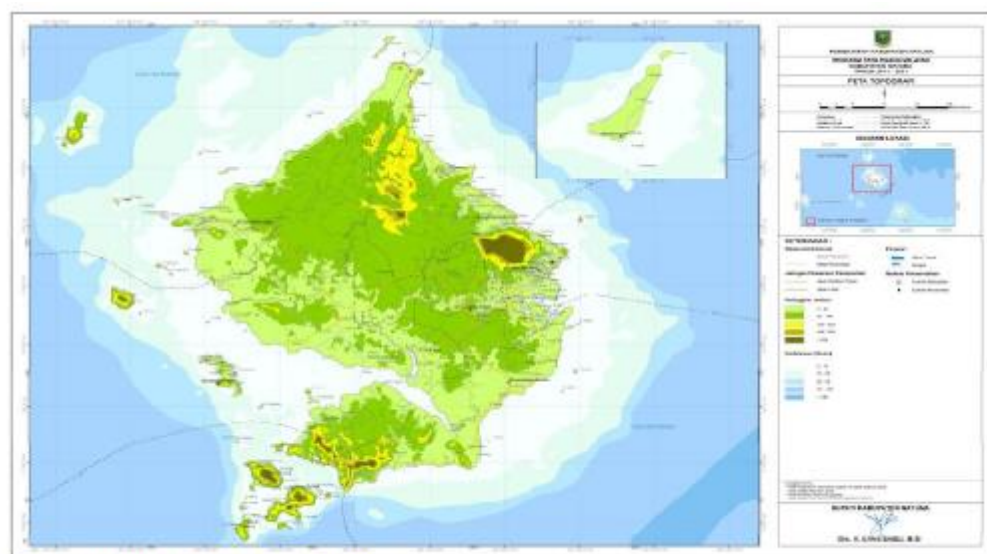
Tabel 2.1 menunjukkan luas daratan yang terluas dari beberapa kecamatan di Kabupaten Natuna, yaitu Kecamatan Bunguran Barat dengan luas 448.46 km² dan luas daratan yang paling kecil adalah Kecamatan Subi dengan luas 23.35 km².

4. Topografi

Dilihat dari bentuk kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna terdiri dari tanah berbukit dan gunung batu. Daratan rendah dan miring, pada umumnya terdapat di pinggiran pantai. Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Hampir 10% dari wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat merupakan daratan rendah dan miring terutama di pinggiran pantai, 65% berombak dan 25% berbukit sampai bergunung. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar

antara 3-959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2-5 meter. Pada umumnya struktur tanah dari tanah podsolik merah kuning dari bantuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus. Wilayah Kecamatan Serasan sebagian besar terdiri perbukitan dan gunung batu dengan keberadaan tanah datar yang relatif terbatas. Di Kecamatan Serasan terdapat beberapa gunung batu yaitu Gunung Kute, Gunung Punjan, Gunung Payak, dan Gunung Pelawan Condong.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Natuna



Sumber : RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031

5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2015 sebanyak 75.060 jiwa, terdiri dari 38.410 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 36.650 jiwa perempuan. Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Timur merupakan dua kecamatan dengan jumlah penduduk

terpadat di Kabupaten Natuna, yaitu masing-masing sebanyak 11.231 jiwa dan 26.127 jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Natuna Tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunguran Barat	5,786	5,445	11,231	106,26
2	Bunguran Selatan	1,337	1,270	2,607	105,28
3	Bunguran Tengah	1,558	1,437	2,995	108,42
4	Bunguran Timur	13,543	12,584	26,127	107,62
5	Bunguran Timur Laut	2,295	2,162	4,457	106,15
6	Bunguran Utara	2,047	1,946	3,993	105,19
7	Midai	2,571	2,567	5,138	100,16
8	Pulau Laut	1,287	1,148	2,435	112,11
9	Pulau Tiga	2,635	2,325	4,960	113,33
10	Serasan	2,490	2,466	4,956	100,97
11	Serasan Timur	1,449	1,362	2,811	106,39
12	Subi	1,412	1,938	3,350	101,00
TOTAL		38,410	36,650	75,060	106,37

Sumber: BPS Kab. Natuna, 2015

Perbandingan rasio antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan berfluktuasi berdasarkan wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Natuna, dimana nilai rasio tertinggi pada wilayah kecamatan Pulau Tiga dan terendah pada wilayah kecamatan Midai.

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3 Perbandingan Penduduk Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin

N0.	Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	38,410	51.17239542
2	Perempuan	36,650	48.82760458
TOTAL		75,060	100

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2015

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan tidak jauh berbeda namun lebih banyak penduduk laki-laki yaitu berjumlah 51%. Hal tersebut berarti jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat umur dikelompokan untuk mengetahui umur produktif di sebuah wilayah, keadaan penduduk di Kabupaten Natuna tercantum dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4 Perbandingan Penduduk Natuna Berdasarkan Umur

No.	Umur (Tahun)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1	0 - 14 Tahun	33
2	15 - 59 Tahun	61
3	> 60 Tahun	6
TOTAL		100

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2015

Berdasarkan tabel 2,3 dapat diketahui bahwa Kabupaten Natuna memiliki usia produktif yang lebih tinggi yaitu 61% dari jumlah penduduk di Kabupaten Natuna berada pada usia produktif.

B. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai visi yaitu “Memberdayakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Menuju Kabupaten Natuna Yang Sejahtera, Merata dan Seimbang”. Untuk mencapainya dan terealisasi visi yang telah ditetapkan tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menetapkan misi dalam memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut sebagai berikut:

- a) Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap secara optimal dan lestari.
- b) Peningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung hasil Perikanan.
- c) Mewujudkan Penegakan supermasi hukum dan pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan terutama berkaitan dengan *Illegal Fishing*.
- d) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dinas kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana bidang kelautan dan perikanan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah Naungan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantu yang diberikan serta yang diamanahkan oleh Bupati. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c) Pengelola urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.
4. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Identifikasi dan Pendataan Pemanfaatan;
 - b. Seksi Pengolahan Rehabilitasi dan Perlindungan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
5. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha;
 - b. Seksi Bina Mutu Pemasaran dan Promosi;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah dan komposisi pegawai yang cukup kondusif yaitu berjumlah 89 orang. Adapun jumlah 89 orang tersebut

terdiri dari 4 orang golongan IV, 29 orang golongan III, 24 orang golongan II dan 37 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Daftar nominatif pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada Grafik 2.1 serta struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dapat lihat pada Gambar 1.1.

Tabel 2.5

Daftar Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016

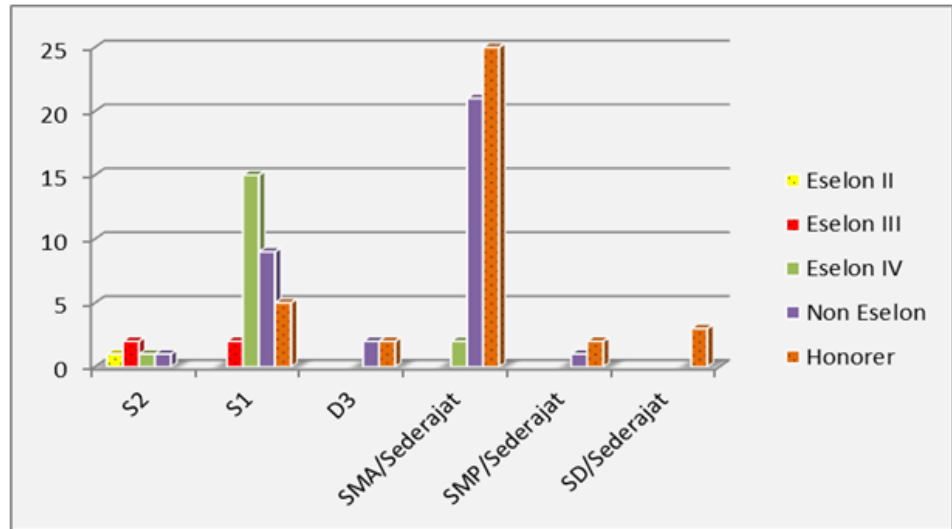
No.	TINGKAT PENDIDIKAN	ESELON			NON ESELON	HONORER /PTT	JUMLAH
		II	III	IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sarjana/S2	1	2	1	1	-	5
2	Sarjana/S1	-	2	12	9	5	28
3	Diploma/D3	-	-	-	2	2	4
4	SLTA/Sederajat	-	-	-	21	25	46
5	SLTP/Sederajat	-	-	-	1	2	3
6	SD/Sederajat	-	-	-	-	3	3
JUMLAH		1	4	13	34	37	89

Sumber: Lakip 2016 DKP Kab. Natuna

Dari Tabel 2.5 dapat dilihat komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna cukup baik, dimana sebaran tingkat pendidikan bervariasi baik dari berpendidikan Strata 2, Strata 1, SLTA/Sederajat, SLTP/Sederajat dan bahkan SD sederajat disesuaikan dengan tingkat status kepegawaiannya.

Grafik 2.1

Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Natuna Tahun 2016



Sumber: Lakip 2016 DKP Kab. Natuna

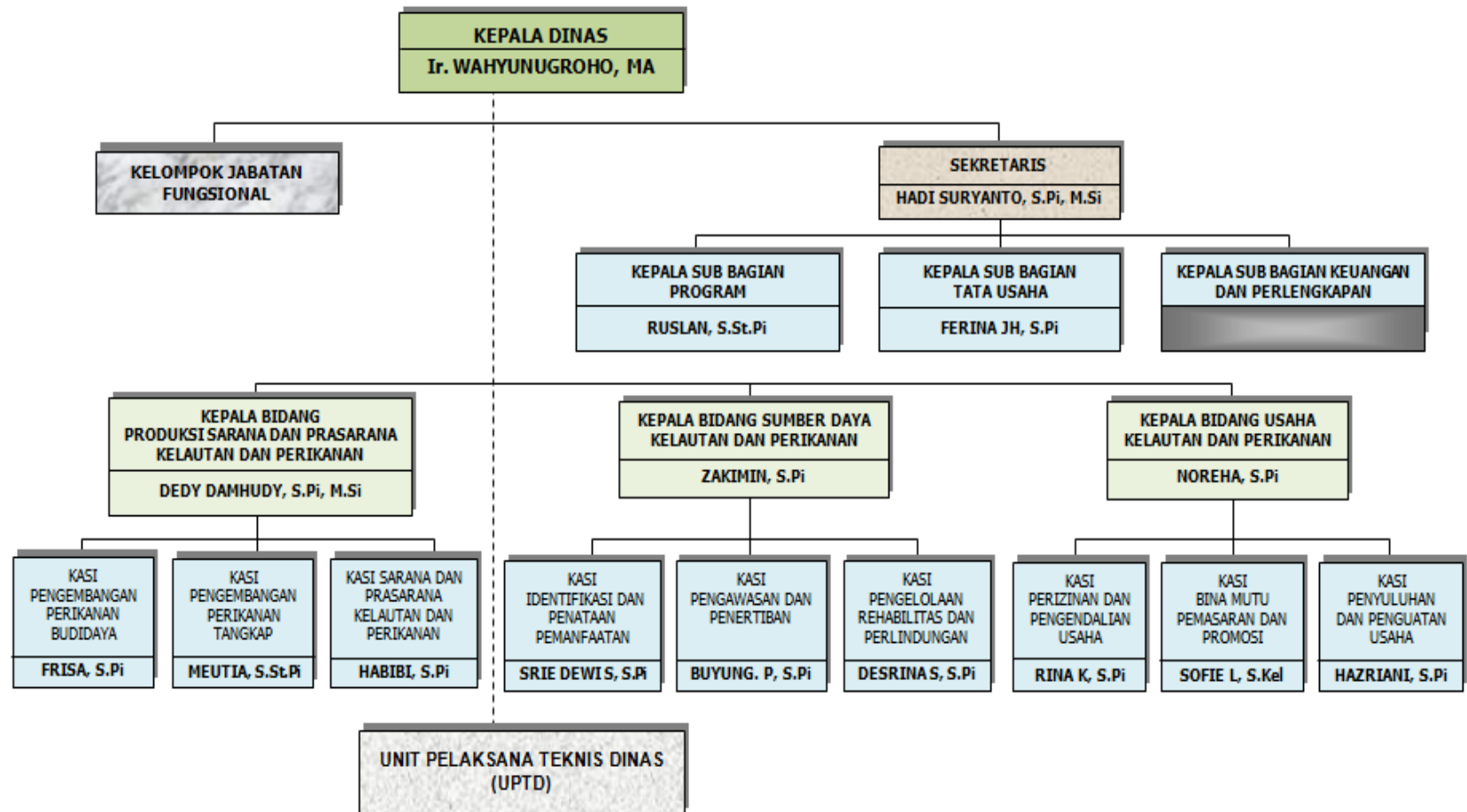
Dari Grafik 2.1 dapat dilihat komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tidak seimbang/selaras, dimana sebaran tingkat pendidikan Strata 1 dan SLTA/Sederajat mendominasi jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna untuk Tahun 2016.

2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Dalam rangka menjamin kelancaran program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, yakni terselenggaranya berbagai aktivitas yang ada didalam suatu organisasi, maka perlu diperjelas dengan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Adapun posisi, tugas pokok dan wewenang serta

tanggungjawab dari masing-masing bidang dalam suatu organisasi, maka perlu dibuat suatu susunan atau lazimnya disebut dengan struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah suatu bagan yang menunjukkan hubungan antar individu dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur, setiap personil yang telah dipersiapkan untuk memegang suatu jabatan akan mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing bidang ataupun bagian. Berikut ditampilkan struktur organisasi dan tata laksana yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Gambar 2.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA



Sumber: Rentra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, 2016

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2005 bab IV tentang organisasi, tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas di bidang ketatausahaan dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja berlandaskan dari data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan proses ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas.
- b) Memberi petunjuk kepada para Kepala Subdinas dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik
- c) Mengatur pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian sesuai ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerja sama yang

baik, serasi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas.

- d) Memeriksa surat dan naskah yang akan disampaikan kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf terhadap surat dan naskah dinas yang benar.
- e) Mengontrol administrasi surat-surat melalui buku agenda, arsip dan buku ekspedisi agar pendistribusian dan pengarsipan surat dilaksanakan secara sistimatis dan teratur.
- f) Memeriksa hasil inventarisasi dan evaluasi pengadaan kebutuhan perlengkapan sesuai dengan data yang tersedia dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan kebenaran data.
- g) Mengarahkan surat-surat pada unit pengelola dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
- h) Membina dan mengendalikan administrasi Keuangan dan Perlengkapan, Umum dan Kepegawaian serta Program dan Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna agar pengelolaan administrasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

- i) Memeriksa konsep surat, nota dinas, usul kenaikan pangkat, KGB serta Izin Cuti Pegawai dilingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan disiplin Pegawai untuk disampaikan kepada atasan.
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan.

3. Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Untuk merealisasikan tugas tersebut maka pada Bidang produksi dan Prasarana perikanan mempunyai tugas:

- a) Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan bimbingan sarana Produksi serta.
- b) Pengujian terhadap sarana Produksi serta penyusunan dan bimbingan penerapan
- c) Pola produksi Perikanan.

- d) Inventarisasi, identifikasi pembinaan pengembangan dan pengendalian
- e) Penangkapan ikan, budidaya perikanan diperairan laut, penyu dan perairan
- f) Umum/ air tawar.
- g) Inventarisasi, identifikasi dan penyiapan rancangan dalam pengembangan dan rehabilitasi serta oprasional prasarana lingkungan dan pemukiman nelayan dan sarana budidaya perikanan serta merumuskan pola tata laksana pengelolaan.
- h) Bimbingan teknologi penangkapan dan budidaya perairan.
- i) Penyiapan bahan bimbingan, penyuluhan dan penerapan teknologi.
- j) Mengkordinir pelaksanaan BBIP Kabupaten Natuna.

4. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut atas pada Bidang produksi dan Prasarana perikanan mempunyai tugas:

- a) Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan pemetaan potensi sumberdaya ikan diperairan umum, sungai, waduk,rawa dan genangan air lainnya, serta penghitungan pementaan pontensi lahan budidaya dan areal penangkapan ikan;
- b) Membuat petunjuk operasional pengawasan, mengevaluasi serta memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c) Inventarisasi, idenfikasi dan bimbingan operasional perlindungan hayati, non hayati serta lingkungan yang meliputi konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis, langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
- d) Penataan, pengelolaan, pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan serta pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal yang tenggelam.

5. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas:

- a) Analisis usaha petani ikan / nelayan, bimbingan pengendalian, pengelolaan dan kerja sama usaha Perikanan;
- b) Pelayanan dan pengawasan izin usaha Perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan;
- c) Pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana dan prosedur dan metode pangujian serta pengadaan unit pengelolaan Perikanan dan pengelolaan hasil Perikanan;
- d) Bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil Perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam dan di luar negeri;
- e) Penetapan dan pemungutan pajak dan pemungutan hasil perikanan dan kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaku perikanan dan nelayan / petani ikan;
- g) Penyiapan bahan bimbingan dan manajemen serta pemberdayaan masyarakat pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil;

- h) Penyiapan rancangan program investasi dan kerjasama di dalam dan luar negeri;
- i) Penyiapan rancangan dan pengembangan dan pembinaan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan.

C. Profil Nelayan di Kabupaten Natuna

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang hidupnya di daerah perairan dengan mengandalkan kehidupannya tergantung dari hasil laut. Ketergantungan hasil dari laut, baik melakukan dalam bentuk penangkapan maupun secara budidaya. Nelayan pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sungai dan daerah pesisir pantai. Kehidupan nelayan pada saat ini belum dapat dikatakan layak bahkan dikatakan masih jauh dari kesejahteraan.

Kehidupan nelayan masih dianggap sebagai golongan masyarakat yang termarginalkan, dimana masih terdapat kehidupan nelayan yang masih dalam kondisi yang belum sejahtera dan dianggap golongan marginal seperti cara penangkapan yang masih tergolong tradisional, rendahnya pendidikan dan pola pemasaran produk yang belum tersistem. Selain itu, minimnya fasilitas dan kurang standar perlengkapan yang dimiliki oleh para nelayan juga menjadi faktor penentu yang mendasar dalam meningkatkan jumlah hasil tangkapan pada setiap pergi melaut. Kemampuan bertahan untuk lama berada di laut merupakan kunci utama dalam mencari dan memperoleh hasil tangkapan yang maksimal.

Kemampuan setiap nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan yang maksimal dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai dan motivasi berada di laut lebih lama serta mengetahui daerah-daerah yang berpotensi banyaknya ikan untuk ditangkap lebih banyak pada saat pergi melaut.

Nelayan di Kabupaten Natuna tentunya memiliki beberapa kriteria nelayan, dimana terdapat nelayan yang masih sangat tradisional dan nelayan yang memiliki fasilitas dan perlengkapan yang sedikit memadai tetapi masih ketinggalan jauh dari nelayan-nelayan lainnya di Bumi Nusantara seperti nelayan Banten, Tegal, Banjar dan lain-lainnya. Sementara kandungan hasil lautnya yang melimpah, dimana banyaknya nelayan daerah Nusantara dan bahkan nelayan Negara Asing yang datang ke Natuna dengan tujuan menangkap ikan di daerah perairan Natuna.

Natuna dengan potensi kelautan dan kekayaan akan ikan yang melimpah, tetapi masih terdapat golongan nelayan di Natuna yang masih jauh dari kesejahteraan. Kemampuan nelayan di Natuna masih kalah jauh terhadap nelayan lainnya, dimana masih banyak ukuran kapal tangkap yang belum standard dan ketidakmampuan berlama-lama berada di laut masih menjadi faktor yang dominan akan terus dialami oleh nelayan di Natuna.

Selain itu juga, masih minimnya kemampuan nelayan yang menguasai teknologi sebagai pendukung utama dalam meningkatkan jumlah tangkapan seperti GPS (Global Positioning System) dan radar ikan. Pada hal GPS dan radar ikan merupakan alat yang sangat membantu dalam melakukan kegiatan melaut. Menggunakan GPS, seseorang nelayan

dengan mudah menentukan posisi mereka dan dapat dengan mudah mengetahui keberadaan ikan di dalam laut.

Secara umum dapat digambarkan, bahwa kondisi nelayan di Natuna pada saat ini masih ketinggalan dari nelayan lainnya seperti nelayan di Bumi Nusantara dan nelayan asing seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Philipina, Malaysia, dan China disebabkan oleh:

1. Kondisi Alam

Natuna dengan luas 264.198,37 km², dimana sebagian besar terdiri dari perairan (laut) yakni seluas 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,30 km². Sementara iklim cuaca di Natuna yang cukup keras pada bulan Juli s/d Desember dan bahkan kadang sampai 9 bulan cuaca yang keras, ini menyebabkan nelayan tidak berani untuk melaut.

2. Tingkat Pendidikan

Nelayan yang menguasai teknologi masih rendah dan belum banyak yang tersentuh teknologi modern serta tingkat produktivitas hasil tangkapan yang masih rendah. Idealnya adalah tingkat pendidikan berbanding lurus dengan teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Teknologi pengawetan ikan yang tepat dan benar akan memberikan menyelesaikan permasalahan terhadap proses pembusukan ikan agar bermanfaat untuk diolah kembali sebagai bahan makanan yang akan menambah nilai lain dari hasil tangkapan nelayan.

3. Pola Kehidupan Masyarakat

Pola malas dan boros merupakan hal yang identic dengan perilaku masyarakat pesisir, dimana seharusnya mereka mencermati untuk

memiliki etos kerja yang lebih giat dengan memanfaatkan waktu istirahat sebagai nilai tambah yang lain seperti memperbaiki jarring dan mengolah hasil tangkapan menjadi bahan makanan yang lain sebagai nilai tambahnya.

4. Pemasaran Hasil Tangkapan

Di pesisir wilayah Kabupaten Natuna tidak semua daerah memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga membuat para nelayan dengan terpaksa menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dengan harga yang masih jauh dari harga pasaran.

5. Kebijakan Pemerintah yang belum memihak ke Nelayan

Keluarnya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap harga BBM menyebabkan harga di tingkat agen sering terjadi kenaikan harga yang tidak profesional (berbeda) dengan harga yang ditetapkan di tingkat daerah kota/kabupaten. Panjangnya distribusi BBM menyebabkan harga semakin tinggi dan bahkan berpotensi permainan antar agen dalam menetapkan harga BBM dipasaran.

D. Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berada di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau. sehingga Renstrayang disusun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tetap

menyelaraskan dengan renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Visi dan Misi untuk tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektorr Unggulan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau". Dalam upaya mencapai visi tersebut maka Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan misi dalam memberi arah kebijakan disektor kelautan dan Perikanan. Adapun misi tersebut adalah :

1. Memberdayakan dan membina pelaku usaha dan pelaksana kelautan dan perikanan.
2. Mengelola / mengatur, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Menyediakan dan memfasilitasi pengadaan sarana dana prasarana kelautan dan perikanan dalam rangka optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Meningkatkan, dan memfasilitasi akses pasar serta pelibatan swasta dalam usaha kelautan dan perikanan.

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka disusun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan tersebut yaitu :

1. Menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan serta keluarga pengolah hasil kelautan dan perikanan tangguh dan mandiri.

2. Memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan daerah serta pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Pengembangan industri perikanan melalui pelibatan swasta dan kemitraan peran perbankan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, maka disusun Rencana Strategi bertujuan mendukung dan mencapai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Tujuan tersebut adalah :

1. Pemberdayaan dan peningkatan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan kemampuan instansi dinas kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kemampuan teknis, manajemen, modal usaha, dan kelembagaan nelayan serta pembudidaya ikan, termasuk pemberdayaan perikanan.
3. Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Inventarisasi, identifikasi serta penataan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Perbaikan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.

6. Mendukung, membina, mengembangkan usaha perikanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dan pelibatan stakeholder.

E. Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

1. Potensi Perikanan

Kegiatan perikanan di Kabupaten Natuna didominasi oleh usaha penangkapan ikan. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap mencapai 65,180.34 ton sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 16,202.17 ton. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap tahun 2016 terhadap 2014 mengalami penurunan sebesar -0,36 persen. Sedangkan pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada periode waktu yang sama mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 369,9 persen.

Tabel 2.6
Produksi Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2016

No.	Komponen	Produksi Perikanan (ton)			Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perikanan Tangkap	47,341.58	48,698.85	65,180.34	-0.369021756
2	Perikanan Budidaya	733.69	754.82	16,202.17	369.928853
TOTAL		48,075.27	49,453.67	81,382.51	

Sumber: DKP Kabupaten Natuna, 2016 (diolah)

2. Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Tangkap

Kabupaten Natuna memiliki luas laut mencapai 99,24 persen dari total luas wilayahnya sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi sumberdaya ikan laut Natuna berdasarkan studi identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari potensi WPP 711 sebesar 1.059.000 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (80 persen dari potensi lestari) mencapai 403.370 ton. Komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, 2015).

Distribusi produksi perikanan tangkap tersebar di sebelas kecamatan, dengan produksi tertinggi ada di Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 13.095,48 ton atau 26,89 persen dengan pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 12,65 persen. Produksi terendah adalah Kecamatan Bunguran Tengah yaitu sebesar 181,18 ton .

Tabel 2.7
Volume Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna Tahun
2014-2016

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bunguran Barat	10,723.40	13,095.48	16,835.82
2	Bunguran Selatan	1,568.92	2,096.58	2,932.02
3	Bunguran Tengah	38.30	181.18	548.64
4	Bunguran Timur	4,298.06	4,666.37	4,533.06
5	Bunguran Timur Laut	2,348.28	2,123.16	3,819.48
6	Bunguran Utara	2,728.44	2,510.43	577.38
7	Midai	2,546.72	2,215.85	1,051.20
8	Pulau Laut	894.96	1,052.49	2,643.36
9	Pulau Tiga	8,372.80	6,448.93	912.48
10	Serasan	11,995.70	5,259.95	10,881.30
11	Serasan Timur		6,816.04	5,766.60
12	Subi	1,826.00	2,232.38	13,390.56
JUMLAH		47,341.58	48,698.85	65,180.34

Sumber: DKP Kabupaten Natuna, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap tahun 2016 sebagian besar dihasilkan oleh kecamatan yang termasuk ke dalam Gugusan Pulau Natuna seperti: Bunguran Barat, Serasan Timur, Pulau Tiga, Serasan, dan Bunguran Timur yaitu mencapai 36,286.77 ton. Sisanya dihasilkan oleh kecamatan lain dalam Gugusan Pulau Natuna dengan produksi sebesar 12,412.07 ton.

Tabel 2.8
Jumlah RTP Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna Tahun 2014-2016

No.	Kecamatan	Jumlah RTP Perikanan Tangkap (orang)			Persentase
		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunguran Barat	460	916	884	38.62680587
2	Bunguran Selatan	132	671	671	125.4624876
3	Bunguran Tengah	55	142	142	60.6803716
4	Bunguran Timur	378	764	654	31.53549826
5	Bunguran Timur Laut	234	554	554	53.86751988
6	Bunguran Utara	355	716	171	-30.59609947
7	Midai	318	639	225	-15.88417689
8	Pulau Laut	241	331	200	-8.902496265
9	Pulau Tiga/Pulau Tiga Barat	360	729	546	23.15302135
10	Serasan	802	1,034	802	0
11	Serasan Timur				
12	Subi	284	570	272	-2.135477374
JUMLAH		3,619	7,066	5,121	18.9551082

Sumber: DKP Kabupaten Natuna, 2016 (diolah)

Dari Tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa jumlah RTP perikanan tangkap di Kabupaten Natuna adalah sebanyak 5,121 RTP. Jumlah ini meningkat 18,95 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,619 RTP. Pertumbuhan rata-rata jumlah RTP dari tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 25,07 persen per tahun. Pertumbuhan paling signifikan terjadi di Kecamatan Bunguran Selatan sebesar 125,462 persen per tahun, dari 132 RTP pada tahun 2014 menjadi 671 RTP pada tahun 2016.

Tabel 2.9
Volume Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Natuna
Tahun 2014-2016

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bunguran Barat	171.56	165.86	24.68
2	Bunguran Selatan	23.87	24.62	0.03
3	Bunguran Tengah	48.41	54.87	1.86
4	Bunguran Timur	219.57	229.94	47.05
5	Bunguran Timur Laut	2.60	3.46	1.24
6	Bunguran Utara	12.12	12.98	67.3
7	Midai	2.22	3.08	1.62
8	Pulau Laut	21.55	22.42	85.61
9	Pulau Tiga/Pulau Tiga Barat	90.33	91.08	15.939,63
10	Serasan	116.74	121.05	24.26
11	Serasan Timur			
12	Subi	24.72	25.47	8.89
JUMLAH		733.69	754.83	16,202.17

Sumber: DKP Kabupaten Natuna, 2016 (diolah)

Produksi perikanan budidaya kabupaten natuna dihasilkan oleh usaha pengembangbiakan ikan di suatu wilayah tertentu di Kabupaten Natuna, Produksi perikanan budidaya tahun 2016 sebagian besar dihasilkan oleh kecamatan yang termasuk ke dalam Gugusan Pulau Natuna seperti: Bunguran Barat, Bunguran Timur, dan Serasan, yaitu mencapai 1.640 ton. Sisanya dihasilkan oleh kecamatan lain dalam Gugusan Pulau Natuna dengan produksi sebesar 838 ton.

Tabel 2.10
Jumlah RTP Perikanan Budidaya Kabupaten Natuna
Tahun 2014-2016

No.	Kecamatan	Jumlah RTP Perikanan Budidaya (orang)			Persentase
		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunguran Barat	322	322	339	2.61
2	Bunguran Selatan	12	12	22	35.4
3	Bunguran Tengah	34	34	89	61.79
4	Bunguran Timur	72	72	78	4.08
5	Bunguran Timur Laut	25	25	20	-10.56
6	Bunguran Utara	78	78	15	56.15
7	Midai	20	20	5	-50.00
8	Pulau Laut	42	42	60	19.79
9	Pulau Tiga/Pulau Tiga Barat	210	210	327	24.79
10	Serasan	170	170	162	-2.38
11	Serasan Timur				
12	Subi	55	55	30	-26.15
JUMLAH		1,040	1,040	1,147	5.02

Sumber: DKP Kabupaten Natuna, 2016 (diolah)

Dari Tabel 2.10 dapat dijelaskan jumlah RTP budidaya yang melakukan usaha pengembangbiakan ikan di Kabupaten Natuna adalah sebanyak 1.147. Pertumbuhan rata-rata jumlah RTP dari tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 5.02 persen per tahun. Pertumbuhan paling signifikan terjadi di Kecamatan Bunguran tengah sebesar 61,79 persen per tahun, dari 34 RTP pada tahun 2014 menjadi 89 RTP pada tahun 2016.